TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SISTEM PEMILIKAN HAK MILIK ATAS TANAH PERTANIAN DI INDONESIA

Oleh : Gugum Gumelar, SH.^{*)}

Tanah merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan manusia, lebih lebih bagi masyarakat suatu negara yang bercorak agraris seperti Indonesia, dimana hampir sebagian besar penduduknya menggantungkan sumber penghidupannya pada sektor pertanian. Mengingat pentingnya arti tanah bagi kehidupan maka dalam Pasal 33 ayat 3 Undang undang Dasar 1945 disebutkan : " Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasasi oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat". Agar supaya kemakmuran rakyat ini dapat segera tercapai maka diperlukan adanya suatu sistem pemilikan tanah pertanian yang dapat menjamin para petani untuk dapat memiliki tanah pertanian sendiri.

Pendahuluan

Salah satu bagian yang cukup penting dari Undang Undang Pokok Agraria (Undang-Undang No. 5 Tahun 1960) adalah yang berkaitan dengan Landreform, seperti mengenai ketentuan ketentuan tentang masalah pemilikan dan penguasaan luas maksimum dan luas minimum atas tanah pertanian. Ketentuan ketentuan tentang *landreform* ini diatur di dalam pasal-pasal 7, 10 dan 17 UUPA.

Pasal 7 melarang adanya penguasaan tanah secara besar-besaran yang bertentangan dengan kepentingan umum, pasal 10 ayat 1 menetapkan bahwa setiap pemilik hak atas tanah pertanian harus mengolah tanah pertaniannya secara sendiri, tuan tanah yang menguasai tanah pertanian secara *absente* pada azasnya dilarang dan pasal 17 menetapkan bahwa harus diatur batas maksimum dan minimum tanah yang dapat dikuasai oleh seseorang atau keluarga.

Untuk merealisir pasal pasal 7, 10 dan 17 UUPA ini, maka pada tanggal 29 Desember Tahun 1960 diundangkan Undang-undang No 56/Prp/Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. Dalam undang undang diatur tiga hal pokok yaitu:

1. Penetapan luas maksimum pemilikan dan penguasaan tanah pertanian;
2. Penetapan luas minimum pemilikan tanah pertanian serta larangan untuk melkukan perbuatan hukum yang mengakibatkan pemecahan tanah pertanian menjadi bagian bagian yang sangat kecil;
3. Pengaturan kembali gadai tanah pertanian.

Peraturan ini kemudian dikenal sebagai Undang Undang Ladreform, yang mempunyai tujuan utama untuk menaikkan tingkat hidup dan kehidupan diantara petani.

*) *Stap pada bidang Diklat PKDA I LAN Bandung*

Pengertian Landreform

Menterjemahkan definisi *Landreform* secara harafiah akan menghadapi suatu hal yang membingungkan karena istilah *land* itu sendiri mempunyai arti sebagai macam pengertian, bisa berarti tanah juga bisa berarti negeri, sedangkan istilah *reform* berarti mengubah, dan terutama mengubah ke arah yang lebih baik. Jadi *landreform* berkaitan dengan perubahan struktur secara instusional yang mengatur hubungan manusia dengan tanah.

Karena mempunyai pengertian yang sangat luas, *landreform* diartikan berbeda beda menurut pengertian yang berlainan pada setiap disiplin. Budi Harsono (*Hukum Agraria Indonesia*, Jilid I Bagian I, Jambatan 1970 hal 2) membedakannya dua pengertian yaitu:

1. *Landreform* dalam arti luas;
2. *Landreform* dalam arti sempit.

Landreform dalam arti luas disebut juga dengan *Agrarian Reform* yaitu penyelesaian penyelesaian persoalan persoalan agraria itu sendiri pada waktu dibentuknya Undang Undang Pokok Agraria, ini merupakan revolusi dalam bidang agraria. *Agrarian Reform* ini meliputi lima program yaitu :

1. Pembaharuan Hukum Agraria;
2. Penghapusan hak hak asing dan konsesi konsesi kolonial atastanah;
3. Mengakhiri penghisapan feodal atau paratuan tanah secara berangsur angsur;
4. Perombakan mengenai pemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan hukum yang berkenaan dengan penguasaan tanah yang bersangkutan;
5. Perencanaan, persediaan dan penggunaan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya secara berencana sesuai dengan daya kesanggupannya dan kemampuannya.

Keseluruhan program tersebut di atas disebut *Landreform* dalam arti luas, dan program yang nomor empat disebut *Landreform* dalam arti sempit, yang mencakup perombakan mengenai sistem pemilikan dan penguasaan tanah serta berbagai hubungan hukum yang berkenaan dengan penguasaan tanah yang dimaksud.

Tujuan Landreform

Menegenai tujuan *landreform* ini, terdapat banyak pendapat dari berbagai kalangan, antara lain Menteri Agraria Sadjarwo dalam pidatonya tanggal 12 September 1960, dalam sidang pleno DPR GR menyatakan bahwa tujuan *landreform* di Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengadakan pembagian yang adil atas sumbangan penghidupan rakyat yang berupa tanah, dengan maksud agar pembagian yang adil pula, dengan merombak struktur pertanahan sama sekali secara revolusioner guna merealisir keadilan sosial;
2. Untuk melaksanakan prinsip " tanah untuk tani " agar tidak lagi terjadi tanah sebagai obyek spekulasi dan obyek pemerasan;
3. Untuk memperkuat dan memperluas hak milik atastanah bagi setiap warga negara Indonesia, baik laki laki maupun perempuan, yang berfungsi sosial. Suatu pengakuan dan perlindungan terhadap *privat bezit*, yaitu hak milik sebagai hak yang terkuat dan terpenuh, bersifat perorangan dan turun temurun, tetapi berfungsi sosial;
4. Untuk mengakhiri sistem tuan tanah dan menghapuskan pemilikan dan penguasaan tanah secara besar besaran

dengan tak terbatas, dengan menyelenggarakan batas maksimum dan minimum untuk tiap keluarga. Dengan demikian menyingkirkan sistem liberalisme dan kapitalisme atastanah, dan memberikan perlindungan terhadap golongan ekonomi lemah;

5. Untuk mempertinggi produksi nasional dan mendorong terselenggaranya pertanian yang intensif secara gotong royong dalam bentuk koperasi dan bentuk gotong royong lainnya, untuk mencapai kesejahteraan yang adil dan merata, dibarengi dengan suatu sistem perkreditan yang khusus ditujukan kepada golongan petani.

Selain tersebut di atas dijelaskan pula dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah No. 224/Tahun 1961 bahwa salah satu tujuan dari *landreform* adalah mengadakan pembagian yang adil dan merata atas sumber penghidupan rakyat tani yang berupa tanah, sehingga dengan pembagian tersebut dapat dicapai penghasilan yang adil dan merata pula.

Sedangkan menurut Budi Harsono dalam bukunya "*Hukum Agraria Indonesia*", menjelaskan bahwa tujuan dari *landreform* yang diselenggarakan di Indonesia adalah untuk mempertinggi taraf hidup para petani penggarap tanah, sebagai landasan atau prasyarat untuk menyelenggarakan pembangunan ekonomi yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Dari berbagai pendapat tentang tujuan *landreform* itu dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu:

1. Secara politis, bertujuan mengakhiri sistem tuan tanah dan menghapuskan pemilikan tanah yang melampaui batas;
2. Secara ekonomis, bertujuan memperbaiki keadaan sosial ekonomi rakyat dengan memperkuat hak milik,

seimbang dengan fungsi sosialnya dan sekaligus meningkatkan produksi nasional di sektor pertanian, khususnya guna mencapai swasembada pangan dan meningkatkan taraf hidup para petani;

3. Secara psikologis, bertujuan untuk meningkatkan kegairahan bekerja para petani, dengan memperbaiki kepastian hak milik atas tanah, serta memperbaiki hubungan kerja dan pembagian hasil antara pemilik tanah dan penggarap.

Penetapan Batas Luas Minimum Pemilikan Tanah Pertanian

Tidak perlu dijelaskan lagi, bagaimana pentingnya pertanian bagi perekonomian di negara-negara yang sedang berkembang, yang menyebabkan ini sangat penting adalah tidak hanya kenyataan bahwa kehidupan manusia tergantung pada pertanian, dari sektor ini pula memancar jumlah surplus ekonomi yang berarti, seperti disebutkan oleh Gunnar Myrdal: "di sektor inilah perjuangan dan perkembangan ekonomi jangka panjang akan berhasil atau gagal" (dikutip dari Buku Ari Sukanti Hutagalung: *Program Redistribusi Tanah Di Indonesia* Hal 15).

Mengingat pentingnya arti pertanian dalam kehidupan ekonomi, maka hal ini akan berkaitan dengan sistem pemilikan tanah, sebab sistem pemilikan tanah baik secara langsung maupun tidak langsung mempunyai peranan yang sangat luas bagi segala sektor kegiatan perekonomian. Bukti menyatakan bahwa pada umumnya di negara-negara berkembang sangat banyak petani yang bekerja di atas tanah orang lain dengan kondisi kurang baik.

Untuk Indonesia sebenarnya telah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur sistem pemilikan tanah, yaitu dalam

pasal 7, 10 dan 17 UUPA, yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Undang-undang No. 56/Prp/Tahun 1960 Tentang Penetapan Batas Luas Tanah Pertanian.

Pada intinya Undang-undang ini mengatur masalah masalah sebagai berikut:

1. Penetapan batas luas maksimum pemilikan tanah pertanian;
2. Penetapan batas luas minimum pemilikan tanah pertanian serta larangan untuk melakukan perbuatan hukum yang mengakibatkan pemecahan tanah menjadi bagian bagian yang sangat kecil;
3. Pengaturan kembali gadai tanah pertanian. Khusus tentang penetapan batas luas minimum pemilikan tanah pertanian diatur dalam pasal 8 UU No.56Prp/Tahun 1960, bahwa Pemerintah mengadakan usaha usaha agar supaya setiap petani beserta keluarganya memiliki tanah pertanian seluas dua hektar.

Penetapan batas luas minimum pemilikan tanah pertanian ini bukanlah suatu ketentuan yang dapat menjamin dengan pasti bahwa setiap keluarga petani nantinya bakal mendapatkan tanah seluas yang ditentukan tadi, karena kitapun tahu bahwa luas tanah itu sangat terbatas, jadi tidak mungkin terdapat hubungan langsung antara tanah dengan semua manusia, paling tidak dapat diusahakan sebanyak mungkin manusia dapat berhubungan dengan tanah.

Tidak semua manusia dapat berhubungan langsung dengan tanah, karena keterbatasannya tanah, tetapi dia mempunyai hak untuk mendapat manfaat dari tanah itu, karena seperti disebutkan dalam pasal 6 UUPA, bahwa semua hak atas tanah itu berfungsi sosial.

Sebenarnya Pemerintah telah menyadari tentang keterbatasan tanah ini, makanya penetapan batas luas minimum pemilikan tanah ini, bukanlah berarti bahwa seseorang

yang sudah memiliki tanah pertanian kurang dari luas batas minimum (dua hektar) akan dilarang. Penetapan batas luas minimum pemilikan tanah pertanian ini hanyalah sekedar usaha agar supaya setiap petani beserta keluarganya mempunyai tanah yang cukup luas untuk dapat mencapai taraf penghidupan yang layak, seperti disebutkan dalam Penjelasan umum Undang-Undang No.56/Prp/Tahun 1960 yaitu sebagai berikut:

“Berhubung dengan berbagai faktor yang belum memungkinkan dicapainya batas luas minimum ini sekaligus dalam waktu singkat, maka ditetapkan bahwa pelaksanaannya akan dilakukan secara berangsur-angsur (pasal 17 UUPA), artinya akan diselenggarakan tahap demi tahap. Padatahap permulaan penetapan batas luas minimum bertujuan untuk mencegah dilakukannya pemecahan lebih lanjut, karena hal yang demikian akan menjauhkan kita dari usaha untuk mempertinggi taraf hidup petani sebagai yang dimaksudkan atas. Penetapan batas luas minimum tidak berarti bahwa yang sudah mempunyai tanah kurang dari batas itu dipaksa untuk melepaskan tanahnya”.

Pada dasarnya diadakannya/ditetapkannya batas luas minimum pemilikan tanah pertanian ini adalah untuk mempertinggi taraf hidup para petani pada khususnya dan taraf hidup semua rakyat pada umumnya, tetapi tidaklah cukup hanya dengan usaha yang demikian itu, tanpa dibarengi dengan usaha usaha dan tindakan tindakan lain agar supaya tujuan itu bisa tercapai, misalnya diadakannya pembukaan tanah tanah pertanian baru, transmigrasi, industrialisasi, intensifikasi pertanian, pemberian kredit yang cukup yang dapat diserahkan pada waktunya dengan mudah dan murah.

Larangan Pemecahan/Diviasi Terhadap Hak Milik Atas Tanah Pertanian

Pemilikan atas sebidang tanah pertanian di negara kita oleh seorang petani dapat dikatakan semakin lama semakin sempit, sehingga terwujudlah petani petani ekonomis lemah, hal yang demikian disebabkan oleh terjadinya *diviasi* atau perpecahan dalam hak pemilikannya. Padahal ditetapkan batas luas minimum pemilikan tanah pertanian salah satu tujuannya adalah untuk mencegah dilakukannya pemecahan terhadap tanah pertanian lebih lanjut, karena hal yang demikian akan semakin menjauhkan dari usaha usaha untuk mempertinggi taraf hidup petani, maka kemudian lebih lanjut dalam pasal 9 ayat 1 Undang Undang No.56/Prp/Tahun 1960 ditegaskan bahwa pemindahan hak atas tanah pertanian, kecuali pembagian warisan, dilarang apabila pemindahan hak itu mengakibatkan timbulnya atau berlangsungnya pemilikan tanah yang luasnya kurang dari dua hektar. Larangan termaksud tidak berlaku kalau si penjual hanya memiliki bidang tanah yang luasnya kurang dari dua hektar dan dijual sekaligus.

Dalam ketentuan yang ditetapkan dalam pasal 9 ayat 1 Undang Undang No. 56/Prp/Tahun 1960 ini, ada dua hal yang harus diperhatikan yaitu:

1. "*timbulnya*" pemilikan tanah pertanian yang luasnya kurang dari dua hektar;
2. "*berlangsungnya*" pemilikan tanah pertanian yang luasnya kurang dari dua hektar.

Suatu peralihan/pemindahan hak milik atas tanah pertanian dikatakan mengakibatkan "*timbulnya*" pemilikan tanah pertanian yang luasnya kurang dari dua hektar apabila pemindahan tersebut terjadi atas tanah yang luasnya dua hektar atau lebih, dan hanya

dipindahkan/dialihkan untuk sebagian saja. Sedangkan suatu peralihan/pemindahan hak atas tanah pertanian dikatakan mengakibatkan "*berlangsungnya*" pemilikan tanah pertanian yang luasnya kurang dari dua hektar, apabila peralihan/pemindahan hak atas tanah pertanian tersebut terjadi atas tanah pertanian yang luasnya dua hektar atau kurang, tetapi bisa juga lebih.

Dengan demikian terhadap tanah pertanian yang luasnya dua hektar atau kurang, kalau mau dipindahkan/dialihkan haruslah dipindahkan semuanya kepada satu orang atau lebih satu orang asal saja masing masing pihak yang menerima pemindahan hak atas tanah pertanian itu telah memiliki tanah pertanian sekurang-kurangnya seluas dua hektar, atau akibat terjadinya pemindahan hak atas tanah pertanian itu, tanah pertanian dari masing masing pihak yang menerima pemindahan luasnya menjadi sekurang kurangnya seluas dua hektar.

Terhadap tanah pertanian yang luasnya lebih dari dua hektar, pemindahan untuk sebagian sebagian diperbolehkan, jika pihak yang menerima pemindahan hak atas tanah pertanian sudah memiliki tanah pertanian sekurang kurangnya seluas dua hektar atau sebagai akibat terjadinya pemindahan itu, tanah pertanian dari pihak yang menerima menjadi sekurang kurangnya dua hektar dan sisanya dipindahkan luasnya pun tidak boleh kurang dari dua hektar.

Jika dua orang atau lebih yang pada waktu mulainya peraturan ini berlaku, memiliki tanah pertanian yang luasnya kurang dari dua hektar, maka dalam jangka waktu satu tahun sejak berlakunya peraturan ini, mereka wajib menunjuk salah seorang dari mereka untuk memiliki tanah itu atau memindahkannya kepada pihak lain, dengan mengingat ketentuan larangan pemindahan

hak atas tanah pertanian yang mengakibatkan timbulnya atau berlangsungnya pemilikan tanah pertanian yang luasnya kurang dari dua hektar, sebagaimana tersebut dalam pasal 9 ayat 1 Undang undang No. 56/Prp/Tahun 1960 (Pasal 9 ayat 2 UU No.56/Prp/Tahun 1960).

Apabila kewajiban untuk memindahkan kepada pihak lain atau menunjuk salah satu dari mereka untuk memiliki tanah pertanian itu tidak dilaksanakan, maka Menteri Agraria (Sekarang Kepala BPN) atau Pejabat yang ditunjuknya dengan memperhatikan keinginan para pemilik tersebut menunjuk salah satu dari anantara mereka yang selanjutnya akan memiliki tanah pertanian tersebut atau menjualnya kepada pihak lain (Pasal 9 ayat 3 UU No. 56/Prp/Tahun 1960).

Walaupun adanya pemindahan/peralihan yang mengakibatkan pemecahan hak milik atas tanah pertanian menjadi kurang dari dua hektar itu dilarang, tetapi masih ada kemungkinan untuk terjadi pemecahan yang disebabkan oleh adanya pewarisan, karena hal ini memang dikecualikan oleh ketentuan pasal 9 ayat 1 tersebut di atas. Tentang Pembagian warisan ini selanjutnya akan diatur dengan Peraturan Pemerintah (Pasal 9 ayat 4 UU No.56/Prp/Tahun 1960), tetapi Peraturan Pemerintah yang dimaksud itu sampai sekarang belum dikeluarkan.

Dengan belum dikeluarkannya Peraturan Pemerintah yang dimaksudkan untuk mengatur pembagian warisan tanah pertanian yang mengakibatkan pemilikan tanah pertanian kurang dari dua hektar, berarti pembagian warisan yang demikian itu masih diperbolehkan, tetapi hal ini bersifat sementara waktu sampai dikeluarkannya Peraturan Pemerintah yang dimaksudkan.

Pemecahan tanah pertanian melalui sistem pewarisan ini (yang bersumber dari

Hukum Agama) berhubungan erat dengan tahap perkembangan ekonomi suatu negara. Selama tidak ada lapangan kehidupan yang lebih baik dan tersedia di luar bidang pertanian, dimana sebagian besar anak anak petani dapat memilihnya, maka pewarisan tanah pertanian kepada anak anaknya tidak dapat dihindarkan. Bila tahap perkembangan ekonomi sudah sedemikian sehingga industri, perdagangan dan perusahaan jasa di luar bidang pertanian sudah maju, maka seyogyanya diatur hanya anak anak petani yang benar benar ingin bertani sajalah yang meneruskan usaha orang tuanya, sementara yang lainnya mendapatkan bagian berupa uang tunai yang dipinjam dari Bank atas nama anak yang tinggal di pertanian dan sebagai jaminan adalah tanah yang bersangkutan.

Melaksanakan larangan pemecahan hak milik atas tanah pertanian seperti yang dimaksudkan dalam pasal 9 ayat 1 Undang Undang No.56/Prp/Tahun 1960 di daerah terutama di daerah padat mungkin sangat berat, sama beratnya pada waktu diberlakukannya UUPA (UU No. 5/Tahun 1960), akan tetapi demi untuk kepentingan perbaikan hidup seluruh penduduk, khususnya penduduk di daerah padat lebih lebih kalau berdampak positif pada kesadaran untuk melakukan perpindahan ke daerah daerah yang menantikan kepindahannya maka pelaksanaan larangan itu perlu ditegaskan karena memang tujuannya sangat positif yaitu demi kelangsungan hidup sesama rakyat Indonesia dari generasi ke generasi.

Maka dari itu untuk menguatkan larangan yang dimaksudkan tersebut di atas, diberikan ancaman pidana bagi yang melanggarnya, seperti disebutkan dalam Pasal 10 ayat 1 UU No.56/Prp/Tahun 1960, yaitu sebagai berikut:

"Dipidana dengan hukuman kurungan selama lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak banyaknya Rp10.000,-

Barang siapa melanggar pasal 4;

Barang siapa tidak melaksanakan kewajiban tersebut dalam pasal 3, 6 dan 7(1);

Barang siapa melanggar larangan yang tercantum dalam pasal 9 ayat 1 atau tidak melaksanakan kewajiban tersebut dalam pasal pasal itu ayat 3.

DAFTAR PUSTAKA

Arie Sukanti Hutagalung, *Program Redistribusi Tanah Di Indonesia*, Rajawali, Jakarta 1985

Bambang Tri Cahyono, *Masalah Petani Gurem, Liberty*, Yogyakarta 1983

Budi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia* Jambatan Jakarta 1970

Eddy Ruchiyat, *Pelaksanaan Landreform dan Jual Gadai Tanah*, Armico, Bandung, 1983

Parlindungan AP, *Landreform di Indonesia Strategi dan Sasarannya*, Alumni, Bandung, 1990

Undang Undang No .5 Tahun 1960 (Undang Undang Pokok Agraria)

Undang Undang No.56/Prp/Tahun 1960 Tentang Penetapan Batas Luas Tanah Pertanian

Optimalisasi Kebijakan Pengembangan Sistem Informasi

Dr. Agus Supriyanto, S.Pd., M.Pd.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi sistem informasi di lingkungan perguruan tinggi. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi sistem informasi dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti: dukungan manajemen puncak, kualitas sumber daya manusia, infrastruktur teknologi informasi, dan komunikasi. Untuk meningkatkan keberhasilan implementasi sistem informasi, diperlukan strategi yang komprehensif yang mencakup aspek-aspek tersebut.

Kata Kunci: Sistem Informasi, Implementasi, Faktor-Faktor, Perguruan Tinggi

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk di lingkungan perguruan tinggi. Sistem informasi yang dirancang dan diimplementasikan dengan baik dapat meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas layanan di perguruan tinggi. Namun demikian, implementasi sistem informasi seringkali menghadapi berbagai tantangan dan hambatan yang dapat menghambat keberhasilan.

Salah satu tantangan utama dalam implementasi sistem informasi adalah kurangnya dukungan manajemen puncak. Tanpa dukungan yang kuat dari pimpinan, upaya implementasi akan sulit berjalan lancar. Selain itu, kualitas sumber daya manusia yang belum memadai juga menjadi kendala yang signifikan. Banyak pegawai yang belum memiliki keterampilan yang diperlukan untuk mengoperasikan sistem informasi yang baru.

Infrastruktur teknologi informasi yang tidak memadai juga dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi. Jika infrastruktur yang ada tidak mendukung kebutuhan sistem informasi yang akan diimplementasikan, maka akan timbul berbagai masalah teknis yang dapat mengganggu proses implementasi.

Keberhasilan implementasi sistem informasi juga sangat dipengaruhi oleh komunikasi yang efektif. Komunikasi yang baik akan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memahami tujuan, manfaat, dan peran masing-masing dalam proses implementasi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi sistem informasi di lingkungan perguruan tinggi. Dengan mengetahui faktor-faktor tersebut, diharapkan dapat dirumuskan strategi yang tepat untuk meningkatkan keberhasilan implementasi sistem informasi di perguruan tinggi.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Dengan menggunakan pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang mendalam mengenai fenomena yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi sistem informasi dipengaruhi oleh faktor-faktor yang saling berkaitan. Faktor-faktor tersebut meliputi: dukungan manajemen puncak, kualitas sumber daya manusia, infrastruktur teknologi informasi, dan komunikasi. Faktor-faktor tersebut saling mempengaruhi dan memperkuat satu sama lain.

Untuk meningkatkan keberhasilan implementasi sistem informasi, diperlukan strategi yang komprehensif yang mencakup aspek-aspek tersebut. Strategi tersebut meliputi: meningkatkan dukungan manajemen puncak, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperbaiki infrastruktur teknologi informasi, dan meningkatkan komunikasi yang efektif.